

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN SURVEI
PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmatnya sehingga laporan Hasil Survey Pelayanan Publik dan Persepsi korupsi Semester II tahun 2019 dapat diselesaikan.

Survey Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi ini merupakan gambaran atas pemberian Pelayanan dan Persepsi Korupsi di instansi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kepada masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Korupsi yang dapat diartikan bahwa Persepsi Korupsi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan bisa dijelaskan/diukur berdasarkan tindakan koruptif yang diterima masyarakat terhadap layanan yang diberikan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei ini merupakan upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam rangka meminimalisir tindakan koruptif aparatur Pengadilan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kami juga menyadari jika pelaksanaan survei dan laporan survei ini tentu masih banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari khalayak senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Pekanbaru, 10 Januari 2020

Ketua

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.
NIP. 195609171979022002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II METODOLOGI.....	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	5
2.5. Teknik Analisis Data.....	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	6
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....	8
3.1. Responden	8
3.2. Indeks Pelayanan Publik Dan Persepsi Korupsi per indikator	8
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	18
BAB IV PENUTUP	20
4.1. Kesimpulan	20
4.2. Rekomendasi	21

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas	6
2. Ruang Lingkup Survei Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	7
3. Nilai Persepsi	7
4. Indeks Indikator Prosedur Pelayanan Jelas	8
5. Indeks Indikator Prosedur Pelayanan mudah dipenuhi	9
6. Indeks indikator Informasi Biaya Pelayanan dapat diketahui dengan jelas	9
7. Indeks Indikator Jangka waktu penyelesaian Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan	10
8. Indeks indikator Waktu Pelayanan di laksanakan sesuai jam kerja	11
9. Indeks indikator Pelayanan Petugas cepat, tanggap, dan ramah.....	11
10. Indeks Indikator Petugas memiliki keahlian yang memadai.....	12
11. Indeks Indikator Tidak ada pembedaan perlakuan (diskriminasi).....	12
12. Indeks Indikator Sarana Prasarana mendukung pemberian pelayanan publik tersedia dan memadai	13
13. Indeks Indikator Fasilitas Pengaduan jelas dan mudah diakses	14
14. Indeks Indikator Petugas Tidak menerima imbalan uang / Barang terkait pemberian layanan (gratifikasi)	14
15. Indeks Indikator Petugas tidak meminta imbalan uang/barang terkait dengan pemberian layanan (pungli)	15
16. Indeks Indikator Tidak terdapat praktek percaloan dalam pemberian layanan .	16
17. Indeks Indikator Tidak ada diskriminasi yang diakibatkan adanya praktek KKN	16
18. Indeks Indikator Telah dilakukan upaya pencegahan korupsi	17
19. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.....	17
20. Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan menekan tindakan koruptif.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan satuan kerja di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang melaksanakan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan memiliki peran dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai satuan kerja yang ingin mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam lingkungan kerjanya, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei untuk mengukur Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

1.3 Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

1.4 Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh

penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 15 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah Kualitas birokrasi yang bersih dan bebas korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

2.4 Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu enam bulan adapun data yang terkumpul sebanyak 76 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang telah di briefing sebelumnya.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru). Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 5. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 5 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan Bebas Korupsi.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Kepuasan Pelayanan Publik masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan Publik pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 5 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

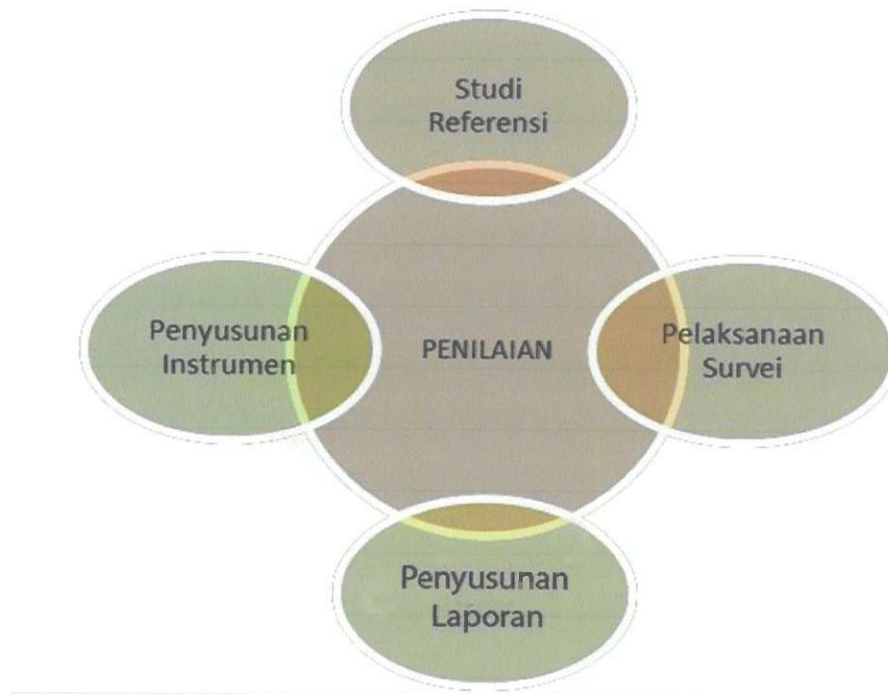
Skala Indeks Persepsi Korupsi antara 1 – 5 yang artinya semakin mendekati

nilai 5 maka persepsi korupsi semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6 Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Prosedur Pelayanan Jelas
2	Prosedur Pelayanan Mudah dipenuhi
3	Informasi Biaya pelayanan diketahui dengan jelas
4	Jangka waktu Penyelesaian pelayanan sesuai dengan ketentuan
5	Waktu pelayanan dilaksanakan sesuai jam kerja
6	Pelayanan petugas cepat, tanggap, dan ramah
7	Petugas memiliki keahlian yang memadai
8	Tidak diskriminasi
9	Sarana Prasarana Pendukung memadai untuk pelaksanaan pelayanan
10	Fasilitas Pengaduan Jelas dan mudah diakses
11	Petugas tidak menerima gratifikasi
12	Petugas tidak pungli
13	Tidak ada praktek percaloan
14	Tidak ada diskriminasi akibat adanya praktek KKN
15	Telah dilakukan upaya pencegahan korupsi

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.80	20.00 - 36.00	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.81 – 2.60	36.01 – 52.00	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.61 – 3.40	52.01 – 68.00	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.41 – 4.20	68.01 - 84.00	4	Bersih dari korupsi
5.	4,21 – 5.00	84.01 – 100.00	5	Sangat bersih dari Korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Responden

Pada semester II tahun 2019 jumlah Responden yang mengikuti Survey Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi berjumlah 76 Orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Anggota Polri, Advokat/Pengacara, Masyarakat, dan Mahasiswa.

3.2. Indeks Persepsi Korupsi

3.2.1. Indikator Prosedur Pelayanan Jelas

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Prosedur Pelayanan Jelas menunjukkan hasil pada interval index 4.54.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Sangat bersih dari Korupsi.

Tabel 4.
Indeks Indikator Prosedur Pelayanan Jelas

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1	1.00 - 1.80	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	4.54
2	1.81 - 2.60	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0	
3	2.61 - 3.40	Cukup bersih dari korupsi	5	15	6.25	
4	3.41 - 4.20	Bersih dari korupsi	25	100	32.89	
5	4.21 - 5.00	Sangat bersih dari korupsi	46	230	60.53	
Jumlah			76	345	100%	

3.2.2. Indikator Prosedur Pelayanan mudah dipenuhi

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Prosedur Pelayanan mudah dipenuhi menunjukkan hasil pada index 4.51.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Sangat bersih dari Korupsi.

Tabel 5.
Indeks Indikator Prosedur Pelayanan mudah dipenuhi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1	1.00 - 1.80	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	4.51
2	1.81 - 2.60	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0	
3	2.61 - 3.40	Cukup bersih dari korupsi	7	21	9.21	
4	3.41 - 4.20	Bersih dari korupsi	23	92	30.26	
5	4.21 - 5.00	Sangat bersih dari korupsi	46	230	60.53	
Jumlah			76	343	100%	

3.2.3. Indikator Informasi Biaya Pelayanan dapat diketahui dengan jelas

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Informasi Biaya Pelayanan dapat diketahui dengan jelas menunjukkan hasil pada index 4,54.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sangat bersih dari korupsi.

Tabel 6.
Indeks indikator Informasi Biaya Pelayanan dapat diketahui dengan jelas

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1	1.00 - 1.80	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	4.54
2	1.81 - 2.60	Kurang bersih dari korupsi	1	2	1.32	
3	2.61 - 3.40	Cukup bersih dari korupsi	7	21	9.21	
4	3.41 - 4.20	Bersih dari	18	71	23.68	

		korupsi				
5	4.21 - 5.00	Sangat bersih dari korupsi	50	250	65.79	
Jumlah			76	344	100%	

3.2.4. Indikator Jangka waktu penyelesaian Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Jangka waktu penyelesaian Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan menunjukkan hasil pada index 4.47.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sangat bersih dari korupsi.

Tabel 7.
Indeks Indikator Jangka waktu penyelesaian Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1	1.00 - 1.80	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	4.47
2	1.81 - 2.60	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0	
3	2.61 - 3.40	Cukup bersih dari korupsi	8	24	10.53	
4	3.41 - 4.20	Bersih dari korupsi	24	96	31.58	
5	4.21 - 5.00	Sangat bersih dari korupsi	44	220	57.89	
Jumlah			76	340	100%	

3.2.5. Indikator Waktu Pelayanan di laksanakan sesuai jam kerja

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Waktu Pelayanan di laksanakan sesuai jam kerja menunjukkan hasil pada index 4.36.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sangat bersih dari korupsi.

Tabel 8.
Indeks indikator Waktu Pelayanan di laksanakan sesuai jam kerja

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1	1.00 - 1.80	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	4.36
2	1.81 - 2.60	Kurang bersih dari korupsi	2	4	2.63	
3	2.61 - 3.40	Cukup bersih dari korupsi	11	33	14.47	
4	3.41 - 4.20	Bersih dari korupsi	21	84	27.63	
5	4.21 - 5.00	Sangat bersih dari korupsi	42	210	55.26	
Jumlah			76	331	100%	

3.2.6. Indikator Pelayanan Petugas cepat, tanggap, dan ramah

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan Petugas cepat, tanggap, dan ramah ini menunjukkan hasil pada index 4.64.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sangat bersih dari korupsi.

Tabel 9.
Indeks indikator Pelayanan Petugas cepat, tanggap, dan ramah

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1	1.00 - 1.80	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	4.64
2	1.81 - 2.60	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0	
3	2.61 - 3.40	Cukup bersih dari korupsi	4	12	5.26	
4	3.41 - 4.20	Bersih dari korupsi	19	76	25.00	
5	4.21 - 5.00	Sangat bersih dari korupsi	53	265	69.74	
Jumlah			76	353	100%	

3.2.7. Indikator Petugas memiliki keahlian yang memadai

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Petugas memiliki keahlian yang memadai menunjukkan hasil pada index 4.53.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sangat bersih dari korupsi.

Tabel 10.

Indeks Indikator Petugas memiliki keahlian yang memadai

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1	1.00 - 1.80	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	4.53
2	1.81 - 2.60	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0	
3	2.61 - 3.40	Cukup bersih dari korupsi	4	12	5.26	
4	3.41 - 4.20	Bersih dari korupsi	28	112	36.84	
5	4.21 - 5.00	Sangat bersih dari korupsi	44	220	57.89	
Jumlah			76	344	100%	

3.2.8. Indikator Tidak ada perbedaan perlakuan (diskriminasi)

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Tidak ada perbedaan perlakuan (diskriminasi) menunjukkan hasil pada index 4.58.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sangat bersih dari korupsi.

Tabel 11.

Indeks Indikator Tidak ada perbedaan perlakuan (diskriminasi)

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1	1.00 - 1.80	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	

2	1.81 - 2.60	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0	4.58
3	2.61 - 3.40	Cukup bersih dari korupsi	8	24	10.53	
4	3.41 - 4.20	Bersih dari korupsi	16	64	21.05	
5	4.21 - 5.00	Sangat bersih dari korupsi	52	260	68.42	
Jumlah			76	348	100%	

3.2.9. Indikator Sarana Prasarana mendukung pemberian pelayanan publik tersedia dan memadai

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Sarana Prasarana mendukung pemberian pelayanan publik tersedia dan memadai menunjukkan hasil pada index 4.50.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sangat bersih dari korupsi.

Tabel 12.
Indeks Indikator Sarana Prasarana mendukung pemberian pelayanan publik tersedia dan memadai

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1	1.00 - 1.80	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	4.50
2	1.81 - 2.60	Kurang bersih dari korupsi	1	2	1.32	
3	2.61 - 3.40	Cukup bersih dari korupsi	6	18	7.89	
4	3.41 - 4.20	Bersih dari korupsi	23	92	30.26	
5	4.21 - 5.00	Sangat bersih dari korupsi	46	230	60.53	
Jumlah			76	342	100%	

3.2.10. Indikator Fasilitas Pengaduan jelas dan mudah diakses

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Fasilitas Pengaduan jelas dan mudah diakses menunjukkan hasil pada index 4.45.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru sangat bersih dari korupsi.

Tabel 13.

Indeks Indikator Fasilitas Pengaduan jelas dan mudah diakses

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1	1.00 - 1.80	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	4.45
2	1.81 - 2.60	Kurang bersih dari korupsi	1	2	1.32	
3	2.61 - 3.40	Cukup bersih dari korupsi	8	24	10.53	
4	3.41 - 4.20	Bersih dari korupsi	23	92	30.26	
5	4.21 - 5.00	Sangat bersih dari korupsi	44	220	57.89	
Jumlah			76	336	100%	

3.2.11. Indikator Petugas Tidak menerima imbalan uang / barang terkait pemberian layanan (gratifikasi)

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Petugas Tidak menerima imbalan uang / barang terkait pemberian layanan (gratifikasi) menunjukkan hasil pada index 4.59.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sangat bersih dari korupsi.

Tabel 14.

Indeks Indikator Petugas Tidak menerima imbalan uang / Barang terkait pemberian layanan (gratifikasi)

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1	1.00 - 1.80	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	4.59
2	1.81 - 2.60	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0	
3	2.61 - 3.40	Cukup bersih dari korupsi	8	24	10.53	

4	3.41 - 4.20	Bersih dari korupsi	15	60	19.74	
5	4.21 - 5.00	Sangat bersih dari korupsi	53	265	69.74	
Jumlah			76	349	100%	

3.2.12. Indikator Petugas tidak meminta imbalan uang/barang terkait dengan pemberian layanan (pungli)

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Petugas tidak meminta imbalan uang/barang terkait dengan pemberian layanan (pungli) menunjukkan hasil pada index 4.57.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sangat bersih dari korupsi.

Tabel 15.
Indeks Indikator Petugas tidak meminta imbalan uang/barang terkait dengan pemberian layanan (pungli)

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1	1.00 - 1.80	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	4.57
2	1.81 - 2.60	Kurang bersih dari korupsi	1	2	1.32	
3	2.61 - 3.40	Cukup bersih dari korupsi	7	21	9.21	
4	3.41 - 4.20	Bersih dari korupsi	16	64	21.05	
5	4.21 - 5.00	Sangat bersih dari korupsi	52	260	68.42	
Jumlah			76	347	100%	

3.2.13. Indikator Tidak terdapat praktek percaloan dalam pemberian layanan

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Tidak terdapat praktek percaloan dalam pemberian layanan menunjukkan hasil pada index 4.58.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sangat bersih dari korupsi.

Tabel 16.
Indeks Indikator Tidak terdapat praktek percaloan dalam pemberian layanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1	1.00 - 1.80	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	4.58
2	1.81 - 2.60	Kurang bersih dari korupsi	1	2	1.32	
3	2.61 - 3.40	Cukup bersih dari korupsi	6	18	7.89	
4	3.41 - 4.20	Bersih dari korupsi	17	68	22.37	
5	4.21 - 5.00	Sangat bersih dari korupsi	52	260	68.42	
Jumlah			76	348	100%	

3.2.14. Indikator Tidak ada diskriminasi yang diakibatkan adanya praktek KKN

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Tidak ada diskriminasi yang diakibatkan adanya praktek KKN menunjukkan hasil pada index 4.55.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sangat bersih dari korupsi.

Tabel 17.
Indeks Indikator Tidak ada diskriminasi yang diakibatkan adanya praktek KKN

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1	1.00 - 1.80	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	4.55
2	1.81 - 2.60	Kurang bersih dari korupsi	1	2	1.32	
3	2.61 - 3.40	Cukup bersih dari korupsi	4	12	5.26	

4	3.41 - 4.20	Bersih dari korupsi	23	115	30.26	
5	4.21 - 5.00	Sangat bersih dari korupsi	48	220	63.16	
Jumlah			76	349	100%	

3.2.15. Indikator Telah dilakukan upaya pencegahan korupsi

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Telah dilakukan upaya pencegahan korupsi menunjukkan hasil pada index 4.57.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sangat bersih dari korupsi.

Tabel 18.
Indeks Indikator Telah dilakukan upaya pencegahan korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase (%)	
1	1.00 – 1.80	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0	4.57
2	1.81 – 2.60	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0	
3	2.61 – 3.40	Cukup bersih dari korupsi	6	18	7.89	
4	3.41 – 4.20	Bersih dari korupsi	21	84	27.63	
5	4.21 – 5.00	Sangat bersih dari korupsi	49	254	64.47	
Jumlah			76	356	100%	

3.3. **Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru**

Dari indeks 15 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebesar 4.53. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 19.
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

No	Unsur Pertanyaan	NRR
Q 1	Prosedur Pelayanan Jelas	4.54

Q 2	Prosedur Pelayanan mudah dipenuhi	4.51
Q 3	Informasi tentang biaya pelayanan dapat di ketahui dengan jelas (berbayar dan gratis)	4.54
Q 4	Jangka waktu penyelesaian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4.47
Q 5	Waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan jam kerja	4.36
Q 6	Pelayanan Petugas cepat, tanggap, dan ramah	4.64
Q 7	Petugas memiliki keahlian yang memadai	4.53
Q 8	Tidak ada perbedaan perlakuan (diskriminalisasi)	4.58
Q 9	Sarana prasarana mendukung pemberian pelayanan publik tersedia dan memadai	4.50
Q 10	Fasilitas pengaduan jelas dan mudah diakses	4.45
Q 11	Petugas tidak menerima imbalan uang/barang terkait dengan pemberian layanan (gratifikasi)	4.59
Q 12	Petugas tidak meminta imbalan uang/barang terkait dengan pemberian layanan (pungli)	4.57
Q 13	Tidak terdapat praktek percaloan dalam pemberian pelayanan	4.58
Q 14	Tidak ada diskriminalisasi yang diakibatkan adanya praktek KKN	4.55
Q 15	telah dilakukan upaya pencegahan korupsi (contoh : spanduk, pamphlet, banner, brosur, dll)	4.57
JUMLAH		67.97
NILAI RATA-RATA IPK		4.53

Keterangan :

Q1 - Q15 : Unsur-unsur Pertanyaan

NRR : **Nilai Rata-rata**

IPK : **Indeks Persepsi Korupsi**

***)** : **Jumlah NRR IPK Tertimbang**

NRR Per Unsur : **Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi**

IPK	: 4.53 (SANGAT BERSIH DARI KORUPSI)
------------	--

Indeks Persepsi Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi SANGAT BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 84,01 – 100,00.

Tabel 20.
Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 - 1.80	20.00 - 36.00	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.81 - 2.60	36.01 – 52.00	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.61 - 3.40	52.01 – 68.00	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.41 - 4.20	68.01 – 84.00	4	Bersih dari Korupsi
5	4.21 - 5.00	84.01 - 100	5	Sangat Bersih dari Korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei pengukuran Persepsi Korupsi yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebesar **4,53** atau masuk pada kategori **Sangat Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 15 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan Jelas	4.54
2. Prosedur Pelayanan mudah dipenuhi	4.51
3. Informasi tentang biaya pelayanan dapat di ketahui dengan jelas (berbayar dan gratis)	4.54
4. Jangka waktu penyelesaian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4.47
5. Waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan jam kerja	4.36
6. Pelayanan Petugas cepat, tanggap, dan ramah	4.64
7. Petugas memiliki keahlian yang memadai	4.53
8. Tidak ada perbedaan perlakuan (diskriminalisasi)	4.58
9. Sarana prasarana mendukung pemberian pelayanan publik tersedia dan memadai	4.50
10. Fasilitas pengaduan jelas dan mudah diakses	4.45
11. Petugas tidak menerima imbalan uang/barang terkait dengan pemberian layanan (gratifikasi)	4.59
12. Petugas tidak meminta imbalan uang/barang terkait dengan pemberian layanan (pungli)	4.57
13. Tidak terdapat praktek percaloan dalam pemberian pelayanan	4.58
14. Tidak ada diskriminalisasi yang diakibatkan adanya praktek KKN	4.55
15. telah dilakukan upaya pencegahan korupsi (contoh : spanduk, pamphlet, banner, brosur, dll)	4.57

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi Korupsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2019 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 4,53 atau masuk pada persepsi Sangat Bersih dari Korupsi. Namun dari 15 (lima belas) indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan jam kerja memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya yaitu 4,36 dan tergolong dalam indikator kinerja Sangat bersih dari korupsi.